

STRATEGI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SYARIAH TUJUAH SARUMPUN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM

¹Anisa Putri, Septria Susanti²

¹ Fakultas Ekonnomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi
anisaaputrio88@gmail.com

² Fakultas Ekonnomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi
septriasusanti@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Kelesuan ekonomi yang terjadi di Ampek Angkek saat ini menjadi pendorong dilakukannya penyelidikan ini., Penelitian ini bertujuan untuk menilai teknik UPK Syariah Tujuhah Sarumpun (program pemberdayaan ekonomi masyarakat) yang paling efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dievaluasi menggunakan Analisis SWOT.. Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan beberapa hasil dan temuan, Dalam penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan beberapa point penting yaitu, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama UPK Syariah. Pendanaan Mikro Syariah serta Mengajak masyarakat untuk menabung. Analisis strategi didapatkan beberapa strategi WT yang bisa diterapkan oleh UPK Syariah Tujuhah Sarumpun yang berupa: Melakukan update regulasi tetapi tetap tegas. Memperbaiki manajemen keuangan UPK Syariah Tujuhah Sarumpun. Memberikan edukasi dan siraman rohani kepada karyawan UPK Syariah untuk mebangkitkan motivasi diri. Merekrut SDM yang lebih baik, agar dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Kemudian juga ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat yaitu: Fasilitas yang terbatas, sehingga kurang optimalnya pemberdayaan Masyarakat, Adanya masyarakat yang kurang jujur dan kurang komitmen dalam menjalankan program yang ada. Kurang pahamnya Masyarakat akan pembukuan dan tata Kelola keuangan yang baik. Terbatasnya pendanaan yang diberikan oleh UPK Syariah sehingga dampak yang dirasakan Masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi kurang. Kemudian dalam pengawasan dilakukan dengan Pembentukan Tim Pengawas, Memberlakukan Pelaporan Berkala, Kunjungan Lapangan, Evaluasi Program, melakukan Audit Keuangan, Pengawasan Syariah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, UPK Syariah, Strategi

Abstract

This research is motivated by the economic decline of the community in Ampek Angkek in recent years. The research aims to analyze the appropriate strategy for empowering the community's economy carried out by UPK Syariah Tujuhah Sarumpun. The method used in this research is a qualitative method and analyzed using SWOT Analysis. After conducting research, several results and findings were obtained. In the implementation of community economic empowerment, the formation of a Sharia

UPK Joint Business Group was discovered. Sharia Micro Funding and Inviting people to save. Strategy analysis revealed several WT strategies that could be implemented by UPK Syariah Tujuh Sarumpun in the form of: Updating regulations but remaining firm. Improving the financial management of UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Providing education and spiritual encouragement to UPK Syariah employees to raise self-motivation. Recruit better human resources, so they can carry out their duties optimally. Then several inhibiting factors were also found in community economic empowerment, namely: Limited facilities, resulting in less than optimal community empowerment, the existence of people who were less honest and lacked commitment in implementing existing programs. The public lacks understanding of bookkeeping and good financial management. The limited funding provided by UPK Syariah means that the impact felt by the community in economic empowerment is less. Then, supervision is carried out by forming a supervisory team, implementing periodic reporting, field visits, program evaluation, conducting financial audits, Sharia supervision.

Keywords: Economic Empowerment, Sharia UPK, Strategy

I. Pendahuluan

Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Ampek Angkek, terdapat fenomena kemiskinan dan pengembangan bisnis. Berdasarkan survei awal yang dilakukan penyebab kemiskinan dikecamatan ampek angkek ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam mengembangkan usaha. hal ini diperkuat oleh priseptian yang mengungkapkan bahwa “indeks pembangunan manusia atau pengetahuan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan diindonesia”. hal ini juga dikuatkan oleh Penelitian lin Sarinah dkk yang mengungkapkan bahwa “Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bidang usaha desa pangandaran dilaksanakan dengan optimal dan terarah hal ini dapat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat di miskin yang ada disana”.

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan bersama sepuluh orang masyarakat penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat mengatakan kurangnya sosialisasi dari pihak UPK Syariah kepada masyarakat dan masyarakat tersebut masih kurang paham bagaimana cara mengelola dana yang telah diberikan oleh pihak UPK Syariah nya dengan baik. Dengan adanya terdapat permasalahan ekonomi di Kecamatan Ampek Angkek, hal tersebut membuat pemerintah daerah membentuk lembaga yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi Masyarakat yaitu UPK Syariah Tujuh Sarumpun, oleh sebab itu diperlukan strategi yang baik dalam menjalankan fungsinya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan masalah yang ada.

Dalam survey yang dilakukan kepada para nasabah UPK syariah tujuh sarumpun, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pembiayaan, sebagaimana mereka diberikan modal dengan anggaran yang kurang memadai dari

usaha yang dimulainya sehingga membuat usaha mereka hanya apa adanya. Serta pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh UPK syariah masih kurang seperti dalam mensosialisasikan cara pengembangan usaha, pemanfaatan modal awal dan sebagainya. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan strategi UPK syariah ampek angkek dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sunaryo et al., 2020).

II. Kajian Pustaka

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Swasono menjelaskan, tujuan pembangunan nasional adalah bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini mengingat penguatan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan memerlukan tindakan dan upaya. Masyarakat sekitar berharap pemberdayaan ini dapat membantu memperbaiki keadaan ekonomi mereka.

Perspektif tambahan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bahwa hal ini merupakan strategi yang memberikan prioritas lebih pada lingkungan berpendapatan rendah dengan memperkuat daya cipta sektor ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka dan membuat mereka lebih kompetitif dalam inisiatif pembangunan ekonomi. Tujuan dari inisiatif pembangunan partisipatif ini adalah untuk membantu masyarakat kelas bawah menjadi lebih kreatif secara ekonomi dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik sehingga mereka dapat menangani kemajuan ekonomi yang dihasilkan dari program-program tersebut dengan lebih baik. (Fatine et al., 2022)

Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif berjalan beriringan; yang pertama memerlukan inisiatif untuk memperkuat institusi-institusi sosial, sedangkan yang kedua memerlukan inisiatif yang sebaliknya, hal ini agar mereka mampu untuk lebih maju, mandiri dan menadapatkan kesejahteraan. Hal ini juga bertujuan untuk mengangkat mereka dari garis kemiskinan dan keterbelakangan. Inilah wujud dari pemberdayaan masyarakat, sementara itu pemberdayaan ekonomi meruapa salah satu wujud pemberdayaan yang berorientasi pada sektor penignkatan ekonomi masyarakat melalui upaya dan langkah yang ditetapkan. Selain itu juga dibutuhkan pendekatan tertentu (Arini, 2022).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Islam

Meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual, menurut ajaran Islam (al-hayah al-thayyibah). Ketakwaan manusia tidak hanya sekedar dalam ibadah wajib saja, akan tetapi bemuamalah atau ekonomi merupakan aspek ibadah dan menuju ketakwaan juga. Oleh sebab itu dengan ekonomi yang baik maka akan memudahkan

manusia dalam melakukan ibadah tertentu seperti sedekah, naik haji dan menolong sesama sesuai dengan ajaran Islam.

Ketika situasi keuangan masyarakat stabil, mereka lebih mampu menabung untuk akhirat dengan menciptakan hal-hal baik untuk dunia. Sebagai bagian dari aktivitas sosial masyarakat yang juga diarahkan oleh Allah, maka praktik ekonomi pun menurut Al Ghazali. Pemenuhannya yang tidak memadai akan merugikan kehidupan di bumi dan berdampak pada kehidupan di akhirat. Menurut Al Ghazali, manusia melakukan kegiatan ekonomi karena tiga alasan utama: untuk memenuhi kebutuhan dasar, untuk meningkatkan kekayaannya, dan untuk meringankan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung.

Agar perekonomian sehat dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia dan setiap individu memiliki motivasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan masyarakat, maupun pengembangan usaha. Usaha yang dimaksudkan bisa mulai dari yang kecil seperti usaha keluarga, UMKM dan sebagainya. Hal ini diharapkan bisa membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi secara konsep sebenarnya pemberdayaan masyarakat secara umum dan pemberdayaan masyarakat dalam Islam kurang lebih sama yaitu untuk kemaslahatan umat (Muheramtohad, 2019).

Strategi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hikmat menyatakan bahwa strategi pemberdayaan adalah cara untuk seluruh sumberdaya yang ada seperti tenaga, dana, dan peralatan yang ada. Sementara itu menurut Suyono strategi pemberdayaan adalah sebuah gerakan dari oleh dan untuk masyarakat. Dan menurut Mardikanto dkk menyatakan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu rencana, strategi sebagai instrumen, strategi sebagai sistem dan pola pikir dari rangkaian pelaksanaan pemberdayaan. Dalam melaksanakan pemberdayaan sangat diperlukan pendekatan.

Sebagaimana menurut Suhrato strategi pemberdayaan terdiri dari lima aspek yaitu:

1. **Pemungkinan**

Pemungkinan merupakan penciptaan suatu suasana maupun iklim yang membentuk potensi masyarakat menjadi lebih berkembang secara optimal. Pemberdayaan ini harus bisa membatasi sekat dan keterbatasan masyarakat secara struktural.

2. **Penguatan**

Apa yang membuat suatu komunitas kuat adalah kapasitas anggotanya untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk

mencapai pemberdayaan ekonomi. Tujuan penguatan adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepercayaan diri masyarakat.

3. Perlindungan

Tujuan perlindungan adalah untuk menjaga keseimbangan yang sehat dalam situasi persaingan dan untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi oleh organisasi yang lebih kuat. Serta untuk melindungi dari berbagai macam diskriminasi yang merugikan masyarakat lemah.

4. Penyokongan

Membantu komunitas berarti membimbing anggotanya dan mendampingi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemberdayaan harus mampu menopang masyarakat agar tidak terpuruk dan melemah secara ekonomi.

5. Pemeliharaan

Untuk menciptakan ruang lingkup kerja yang baik dan optimal, perlu dijaga keadaan. Oleh karena itu, hal ini mendorong kinerja pemberdayaan masyarakat (Jefri et al., 2021).

SWOT

Teknik membandingkan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan digambarkan oleh Gurel dan Tat sebagai SWOT. Kekuatan dan kelemahan dianalisis untuk mengetahui peluang dan ancaman sekarang dan masa mendatang. Semakin tinggi kekuatan dan kelemahan, maka akan semakin tinggi peluang yang akan dicapai. Dengan adanya peluang yang baik maka akan melawan ancaman yang ada, sehingga sebuah instansi atau perusahaan akan menjadi semakin berkembang dengan baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferri et al., Analisis SWOT merupakan sarana untuk mempelajari suatu organisasi dengan melihat faktor internal (kekuatan) dan eksternal (kelemahan).

Tujuan adanya analisis SWOT dalam sebuah lembaga atau organisasi adalah untuk meluruskan faktor internal dan eksternal yang ada didalamnya. Ketika terjadi sebuah kesalahan maka sebuah lembaga harus mengetahui kelemahan yang ada padanya dan mengubah kelemahan tersebut menjadi kekuatan, selain itu juga bisa menganalisis ancaman menjadi sebuah peluang, sehingga mendapatkan solusi yang baik (Muheramtohari, 2019).

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian merupakan instrumen sentral dalam metode penelitian ini, yang menurut Sugiyono

didasarkan pada filosofi post-positif yang mempelajari kondisi benda-benda alam. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan triangulasi (kombinasi), dan hasil penelitian dapat dianalisis secara induktif atau kualitatif. berdasarkan asumsi yang luas.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal skripsi ini bertempat di UPK Tujuh Sarumpun, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam. Pemilihan lokasi pada penelitian ini didasarkan pada fenomena dan permasalahan yang terjadi di kecamatan ampek angkek, yaitu masalah kemiskinan. Waktu penelitian didalam penelitian kualitatif mutlak sangat diperlukan, dengan tujuan untuk dijadikan alat (insrtument) pengumpul data yang utama oleh karena itu kehadiran peneliti dibutuhkan dalam menguraikan data nantinya. Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2023 sampai penelitian ini selesai.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data yang diukur secara tidak langsung, sering disebut sebagai data kualitatif, biasanya diberikan secara verbal dan bukan numerik.

Peneliti mengandalkan sumber primer dan sekunder saat mengumpulkan data. Sumber penelitian dan informan boleh memberikan data tersebut, karena merupakan data asli yang dikumpulkan penulis di lapangan. Kajian ini bertumpu pada pengetahuan dan pengalaman pimpinan, sekretaris, dan bendahara UPK Syariah Tujuh Sarumpun yang menjadi narasumber. Laporan, makalah, dan sumber sekunder lainnya dikonsultasikan oleh penulis untuk penelitian ini.

Informan/Subjek Penelitian

Subjek merupakan orang atau apapun yang menjadi sumber dalam informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sebagaimana Suharsimi menyatakan terdapat tiga kategori dalam subjek penelitian yaitu person, place, dan paper. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah Pihak UPK syariah yang terdiri dari Ketua UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Skretaris, bendaharara, serta masyarakat atau nasabah UPK syariah Tujuh sarumpun ampek angkek kabupaten agam.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian sangatlah penting. Hal ini karena pengumpulan informasi merupakan fokus fase ini. Mirip dengan penelitian ini, penulis menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data.

Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah mereduksi data dengan proses memilih, menyederhanakan dan mentransformasikan data. Menggolongkan memilih dan membuang data yang tidak perlu dalam sebuah penelitian. Penyajian data adalah sebuah rangkaian informasi yang menghasilkan kesimpulan nantinya. Jadi dalam tahap ini akan dikelompokkan sesuai dengan pokok masalah yang ada agar mudah untuk disajikan.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan serta pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa point terkait Strategi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Tujuh Sarumpun Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam:

1. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Tujuh Sarumpun

Setelah dilakukan wawancara dengan informan maka didapatkan beberapa cara pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Berikut adalah beberapa langkah pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang biasanya dilakukan oleh UPK Syariah:

a. Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Masyarakat

UPK Syariah melakukan survei dan diskusi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan ekonomi serta potensi yang dimiliki oleh komunitas.

b. Penyediaan Modal Usaha

UPK Syariah memberikan pinjaman modal berbasis syariah kepada masyarakat yang membutuhkan

c. Pelatihan dan Pendampingan

UPK Syariah mereka juga memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan usaha yang dirintis dapat berjalan sesuai dengan harapan dan berkembang.

d. Pemasaran Produk

Untuk membantu masyarakat dalam memasarkan produk mereka, UPK Syariah sering kali mengadakan bazar murah.

e. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi

UPK Syariah juga berperan dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan pasar desa atau fasilitas produksi.

f. Pemantauan dan Evaluasi

UPK Syariah melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Hal ini untuk melihat sejauh mana program tersebut berhasil dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan apa saja yang perlu diperbaiki.

g. Contoh Implementasi

1) Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

UPK Syariah membentuk kelompok usaha bersama yang beranggotakan masyarakat setempat untuk menjalankan usaha secara kolektif.

2) Pendanaan Mikro Syariah

Memberikan pendanaan mikro dengan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah kepada pelaku usaha mikro.

3) Program Tabungan Wajib dan Tabungan Sukarela

Mengajak masyarakat untuk menabung, baik secara wajib maupun sukarela, sebagai modal untuk masa depan dan untuk pembiayaan usaha

2. Hambatan yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Tujuh Sarumpun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Hambatan tidak lepas dari analisis swot yang dilakukan mana hasilnya dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Analisa SWOT UPK Syariah Tujuh Sarumpun

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
----------------------------	-----------------------------

1. Satu-satunya UPK Syariah Syariah yang ada diAmpek Angkek 2. Tempat yang stretegis 3. Interaksi secara personal antara pihak UPK Syariah dan nasabah 4. Pelayanan yang selalu optimal 5. Kebutuhan akan pembukaan, penyetoran dan tutup buku tabungan	1. Belum kokohnya regulasi UPK syariah tujuh sarumpun 2. Kurangnya permodalan yang diberikan Masyarakat 3. Kurangnya motivasi karyawan untuk berinovasi 4. Kurangnya SDM marketing
---	---

Opportunities (Peluang)	Treaths (Ancaman)
1) Perkembangan teknologi 2) Memperluas Cakupan Masyarakat 3) Adanya bantuan dan perhatian dari pihak ketiga seperti dari Pemerintah Daerah	1) Kurang perhatian masyarakat terhadap produk yang ada 2) Minat masyarakat yang rendah terhadap produk di UPK Syariah 3) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap UPK Syariah syariah. 4) Sitem bunga yang masih melekat pada

Sumber : Wawancara Informan

Hambatan tersebut berupa Fasilitas yang terbatas, sehingga kurang optimalnya pemberdayaan Masyarakat selain itu hambatan juga berupa:

- a. Fasilitas yang terbatas, sehingga kurang optimalnya pemberdayaan Masyarakat

Dengan keterbatasan fasilitas membuat UPK Syariah Tujuh Sarumpun hanya menjalankan program yang ada saja, hal ini menjadi sebuah hambatan dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

- b. Adanya masyarakat yang kurang jujur dan kurang komitmen dalam menjalankan program yang ada.

Komitmen merupakan sebuah rasa saling mempercayai antar pihak satu dengan yang lainnya. Apakah itu secara tersurat ataupun tidak tersirat. Artinya, mereka akan menepati janji satu sama lain dan hubungan mereka akan langgeng tanpa batas waktu.

- c. Kurang pahamnya Masyarakat akan pembukuan dan tata Kelola keuangan yang baik

OJK mengatakan bahwa literasi keuangan merupakan sebuah pengetahuan, kompetensi, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keyakinan yang membentuk tindakan dan pilihan seseorang. Hal ini agar dalam lapangan dan dalam masyarakat mereka paham akan keputusan pendanaan, pemberdayaan, sehingga nantinya masyarakat bisa sejahtera dalam ekonominya.

- d. Terbatasnya pendanaan yang diberikan oleh UPK Syariah sehingga dampak yang dirasakan Masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi kurang

Keterbatasan dana adalah sebuah masalah besar dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. Hal ini dapat mengembangkan usahanya. Semakin banyak dana yang dikucurkan akan semakin banyak juga membantu masyarakat.

3. Pengawasan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Tujuh Sarumpun Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sekretaris UPK Syariah tujuh sarumpun maka dapat disimpulkan beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat ini.

a. Pembentukan Tim Pengawas

UPK Syariah membentuk tim pengawas yang terdiri dari anggota yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dan manajemen usaha.

b. Memberlakukan Pelaporan Berkala

Setiap penerima manfaat program diwajibkan untuk membuat laporan berkala mengenai perkembangan usaha mereka.

c. Kunjungan Lapangan

Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi laporan yang diterima dan memberikan bimbingan teknis secara langsung jika diperlukan.

d. Evaluasi Program

UPK Syariah melakukan evaluasi program secara periodik untuk menilai efektivitas dan dampak dari program pemberdayaan ekonomi.

e. Audit Keuangan

Audit keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

f. Pengawasan Syariah

UPK Syariah melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

g. Pelatihan dan Capacity Building

UPK Syariah juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penerima manfaat program untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha.

h. Feedback dan Penyelesaian Keluhan

Mekanisme feedback dan penyelesaian keluhan diterapkan untuk menangani masalah atau keluhan yang diajukan oleh penerima manfaat.

4. Strategi yang bisa diterapkan oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun

Menyusul selesainya sejumlah tahapan, antara lain identifikasi taktik SO, WO, ST, dan WT. Memilih strategi dari empat pilihan adalah tahap selanjutnya. Hal ini dicapai dengan menggunakan bobot skor untuk mendukung pemilihan strategi. Skor akhir masing-masing strategi ditentukan setelah ditentukan bobot dan nilai rating komponen variabel internal dan eksternal UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek. Agar UPK Syariah lebih mudah dijalankan di kemudian hari, kita dapat memilih strategi yang memiliki skor keseluruhan terbesar setelah mengalikan bobot dan rating.

Tabel 2 Bobot Skor

IFE EFE	Strengths (S) Kekuatan	Weaknesses(W) Kelemahan
	Strategi S-O	Strategi W-O
Opportunities (O) Peluang	Total skor $1.20 + 1.80 = 3.00$	Total skor $2.40 + 1.80 = 4.20$
Threat (T) Ancaman	Strategi S-T Total skor $1.20 + 2.40 = 3.60$	Strategi W-T Total skor $2.40 + 2.10 = 4.50$

Berdasarkan tabel bobot skor diatas telah terdapat pertimbangan dari strategi pada UPK Syariah Tujuh Sarumpun, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif yang terpilih yang memiliki skor yang paling tinggi adalah strategi WT dengan hasil 4.50.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh UPK Syariah tujuh sarumpun yaitu:

a. Melakukan update regulasi tetapi tetap tegas

Agar karyawan bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang fleksibel Untuk melakukan update regulasi secara tegas namun tetap fleksibel agar karyawan dapat menyesuaikan diri, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepatuhan dan adaptabilitas. Oleh karena itu UPK Syariah perlu untuk melakukan pembaharuan aturan, hal ini dikarenakan masih banyaknya adopsi aturan dari PNM yang menjadi asal UPK Syariah itu sendirim sehingga kurang cocok digunakan untuk Lembaga keuangan islam.

b. Memperbaiki manajemen keuangan UPK Syariah Tujuh Sarumpun.

Memperbaiki manajemen keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu UPK Syariah diharuskan untuk melakukan audit keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam sistem keuangan saat ini. Pastikan audit dilakukan oleh auditor yang memahami prinsip syariah. Kemudian Tinjau proses keuangan yang ada untuk menemukan area yang memerlukan perbaikan, seperti pencatatan transaksi, pengendalian internal, dan kepatuhan syariah.

c. Memberikan edukasi dan siraman rohani kepada karyawan UPK Syariah untuk mebangkitkan motivasi diri.

Memberikan edukasi dan siraman rohani kepada karyawan UPK Syariah untuk membangkitkan motivasi diri adalah langkah yang Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Oleh karena itu UPK Syariah Tujuh sarumpun bisa menerapkan startegi berikut: Pelatihan Keuangan Syariah, Pengembangan Keterampilan, Seminar Motivasi, Workshop Interaktif, Kajian Islam.

d. Merekrut SDM yang lebih baik, agar dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.

Rekrutmen adalah sebuah proses yang dilakukan perusahaan untuk mencari kandidat pegawai sesuai kebutuhan perusahaan. Dalam rekrutmen dilakukan beberapa tahapan yaitu indentifikasi dan evalsi, menentukan kebutuhan, proses seleksi, penempatan dan masa orientasi pegawai tersebut.

Merekrut Sumber daya manusia yang lebih berkualitas maka UPK Syariah memerlukan pendekatan yang strategis dan komprehensif. Jadi UPK syariah harus menentukan posisi yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan organisasi. Buat daftar kerja atau jobdesk masing-masing posisi. Evaluasi komitmen kandidat terhadap prinsip-prinsip syariah dan integritas mereka. Pertimbangkan latar belakang pendidikan syariah atau pengalaman kerja di lembaga keuangan syariah.

V. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan beberapa hasil dan temuan, dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Masyarakat ditemukan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama UPK Syariah membentuk kelompok usaha bersama yang beranggotakan masyarakat setempat untuk menjalankan usaha secara kolektif. Pendanaan Mikro Syariah serta Mengajak masyarakat untuk menabung, baik secara wajib maupun sukarela, sebagai modal untuk masa depan dan untuk pembiayaan usaha. Analisis strategi didapatkan beberapa strategi WT yang bisa diterapkan oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun yang berupa: Melakukan update regulasi tetapi tetap tegas, agar karyawan bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang fleksibel. Memperbaiki manajemen keuangan UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Memberikan edukasi dan siraman rohani kepada karyawan UPK Syariah untuk mebangkitkan motivasi diri. Merekrut SDM yang lebih baik, agar dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Kemudian juga ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat yaitu: Fasilitas yang terbatas, sehingga kurang optimalnya pemberdayaan Masyarakat, Adanya masyarakat yang kurang jujur dan kurang komitmen dalam menjalankan program yang ada. Kurang pahamnya Masyarakat akan pembukuan dan tata Kelola keuangan yang baik. Terbatasnya pendanaan yang diberikan oleh UPK Syariah sehingga dampak yang dirasakan Masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi kurang. Kemudian dalam pengawasan dilakukan dengan Pembentukan Tim Pengawas, Memberlakukan Pelaporan Berkala, Kunjungan Lapangan, Evaluasi Program, melakukan Audit Keuangan, Pengawasan Syariah, Pelatihan dan Capacity Building dan Feedback dan Penyelesaian Keluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, N. (2022). Pedesaan, Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Masyarakat Selakau, Di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan. *Jurnal Sebi*
- Fatine, S., Sekolah, P. L., Pendidikan, F. I., & Padang, U. N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Ekonomi Melalui Umkm Ladu Arai Pinang Di Lubuk Buaya Kota Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*
- Jefri, U., Bangsa, U. B., & Bangsa, U. B. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Manajemen Stie Muhammadiyah Palopo Vol, 7*
- Muheramtohad, S. (2019). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*
- Sunaryo, J., Wismar, T., Setio, S., & Bungo, M. (2020). Jasiara Peran Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Kecamatan Asam. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (Jasiora)*
- Yhuda, E. W., & Syariah, P. P. (2022). Analisis Swot Dalam Strategi Pemasaran Pembiayaan Syariah Pada Unit Pengelola Kegiatan Di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. *Sebi*.